

**INOVASI APLIKASI PENGELOLAAN BERKAS DALAM
LAYANAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK
DI KANTAH KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAMA PRENDES DRIANSANI

NIT. 19283274

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Land registration sporadically is a process of recording or registering land ownership rights that are done separately and discontinuously. Sporadic land registration often leads to data fragmentation and difficulties in tracking the comprehensive history of land ownership. In providing services for land registration documents sporadically through the Computerized Land Activity System (KKP), it is found that in the method of sporadic land registration, each transaction or change of land ownership is individually recorded without being linked to other transactions. This results in the Computerized Land Activity System (KKP) being unable to track the registration documents when they stop and cannot accurately identify the holder of the documents. The KKP system can only detect the movement of documents without providing information about the responsible parties for the movement. This research aims to identify concrete solutions that can be applied to enhance the efficiency and effectiveness of land registration processes through an application-based approach, as well as to understand the impact of implementing this solution on the performance of land registration document management at the Land Office.

The method used in this research is the Research and Development method, which involves conducting research and development to produce a specific product and test the effectiveness of the product. The research is conducted by conducting in-depth analyses of the challenges faced by the Land Office of Pasuruan Regency in providing services for sporadic land registration documents through the Computerized Land Activity System (KKP).

The results of this research indicate that the implementation of the AppSheet-based application can provide an effective solution to overcome challenges in providing services for sporadic land registration documents at the Land Office of Pasuruan Regency. By using this application, the process of recording and tracking land registration documents becomes more structured and efficient. This application allows for detailed tracking of the journey of documents, identification of document holders, and provision of more accurate information about the status of document movement. The results of this research also show that the use of the AppSheet application can enhance transparency and accountability in the land registration process. With well-documented records, decision-making becomes more informed and accountable. The use of this application can also reduce the risk of data fragmentation and difficulties in tracking the history of land ownership. The results of functionality testing and user testing demonstrate that the AppSheet application successfully overcomes the challenges previously faced in the Computerized Land Activity System (KKP). This application is capable of providing more comprehensive information about document movement and document holders, as well as improving accessibility for all officials involved in the land registration process.

Keywords: *Sporadic land registration, KKP, efficiency, effectiveness.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR LAMPIRAN	14
BAB I.....	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	22
B. Kerangka Teoritis	24
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Pertanyaan Penelitian	38
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	40
D. Definisi Operasional Konsep.....	41
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis	45
BAB IV	46
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan	46
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Pasuruan	47
BAB V	48
PELAKSANAAN KKP DI KANTAH KABUPATEN PASURUAN.....	48
A. Penggunaan KKP Dalam Layanan Pertanahan	48
B. Pelayanan Pertanahan di Kantah Kabupaten Pasuruan	48
C. Problematika Penggunaan KKP Pada Kantah Kabupaten Pasuruan	50
BAB VI.....	52
SISTEM INFORMASI BERBASIS <i>APPSHEET</i> PADA LAYANAN PERTANAHAN	
.....	52
A. Analisis Kebutuhan Pengguna dan Sistem	52
B. Pembangunan Aplikasi Berbasis <i>Appsheets</i>	57
C. Penyajian Aplikasi Berbasis <i>Appsheets</i>	76
BAB VII	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah menurut Arba dkk. (2021) dapat dilakukan dengan cara sistematis oleh Negara sebagai inisiator dan pelaksana, dan dilakukan secara sporadis atas dasar inisiatif sendiri dari masyarakat. Menurut Masnah (2021) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya percepatan pendaftaran tanah lengkap. Pendaftaran tanah secara sporadik menurut Perkasa dan Lukman (2022) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal dan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menurut Sari (2017) pendaftaran tanah secara sporadik memiliki kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak, dan pembukuan. Karena untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik, perlu dipertimbangkan beberapa karakteristik kualitas, seperti bukti fisik yang jelas, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Menurut Sari (2017) Aspek keandalan merupakan kriteria pertama dalam menilai kualitas layanan pendaftaran tanah sporadik. Keandalan mencakup kemampuan untuk memberikan layanan dengan tepat dan memberikan layanan secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pegawai untuk memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas mereka (Sari, 2017).

Sistem komputerisasi dapat membantu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dengan mempercepat proses pengumpulan dan pengelolaan data fisik, serta pembuktian hak. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, aspek

keandalan merupakan kriteria pertama dalam menilai kualitas layanan. Sistem komputerisasi dapat membantu meningkatkan keandalan layanan pendaftaran tanah sporadik dengan mempercepat proses pengumpulan dan pengelolaan data fisik, serta pembuktian hak. Selain itu, sistem komputerisasi juga dapat membantu meningkatkan daya tanggap layanan pendaftaran tanah sporadik dengan memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada pihak yang berkepentingan (Ilmiyana, 2021). Dengan demikian, penggunaan sistem komputerisasi dalam kegiatan pertanahan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendaftaran tanah secara sporadik.

Dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan memiliki kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran tanah secara sporadik, yang dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Komputerisasi Kegiatan Pertanahan merupakan suatu sistem komputerisasi Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang terpusat dan berbasis komputerisasi. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan digunakan sebagai aplikasi untuk memudahkan pengolahan data pertanahan dan mempercepat proses pelayanan sertifikasi tanah. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan terus dikembangkan dan diperbarui, seperti yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 dengan mensosialisasikan pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan kepada jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia (Pradipta dan Rani, 2020).

Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan juga seberapa besar pengaruh dari kendala tersebut, antara lain:

Kendala-kendala yang disebutkan dalam poin-poin tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pencarian berkas dan akses ke sistem KKP. Berikut adalah seberapa besar pengaruh dari setiap kendala tersebut:

1. Pencarian berkas Pendaftaran secara sporadik tidak bisa dilacak oleh sistem KKP, sehingga mempersulit pelaksanaan pencarian berkas tersebut. Pengaruhnya dapat mencakup:
 - Kesulitan dalam menemukan berkas yang diperlukan;
 - Memakan waktu lebih lama untuk melacak berkas yang hilang;
 - Potensi kehilangan berkas yang penting;
2. Sistem KKP hanya bisa mendeteksi perpindahan berkas tanpa dibarengi dengan siapa yang bertanggung jawab atas perpindahan berkas tersebut. Pengaruhnya dapat mencakup:
 - Kesulitan dalam mengetahui siapa yang harus ditanyai atau dimintai pertanggungjawaban terkait perpindahan berkas;
 - Potensi terjadinya kebingungan atau kesalahan dalam pelacakan berkas;
3. Hanya terbatas orang yang memiliki akses atau akun untuk mengakses sistem KKP, yang dimana akun tersebut hanya dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Asisten Surveyor Kadaster (ASK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) perlu meminta izin terlebih dahulu sebelum diberikan akses ke akun. Pengaruhnya dapat mencakup:
 - Keterbatasan akses bagi ASK dan PPNPN dalam menggunakan sistem KKP.
 - Membutuhkan waktu tambahan untuk meminta izin akses setiap kali ingin menggunakan sistem KKP.
4. ASK dan PPNPN biasanya menyimpan akses akunnya setelah izin sehingga bisa mengakses akun tanpa perlu izin lagi, namun untuk akses melalui aplikasi Autocad di KKP, ASK dan PPNPN bisa langsung masuk ke akun tanpa izin. Namun, untuk akses melalui Web KKP, ASK dan PPNPN perlu meminta izin kembali karena setiap akses ke akun membutuhkan kode akses masuk dari email dan kodenya berwaktu. Pengaruhnya dapat mencakup:
 - Keterbatasan akses langsung tanpa izin melalui aplikasi Autocad di KKP.
 - Membutuhkan waktu tambahan untuk meminta izin kembali saat ingin mengakses melalui Web KKP.

Pengaruh dari kendala-kendala tersebut dapat mencakup penundaan dalam pencarian berkas, kebingungan dalam pelacakan berkas, kesulitan dalam

mengakses sistem KKP, dan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi Autocad dan akses melalui Web KKP. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dapat dilakukan langkah-langkah seperti meningkatkan sistem pelacakan berkas, memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perpindahan berkas, dan memperluas akses ke sistem KKP.

Alasan memilih AppSheet untuk membangun aplikasi karena memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi khusus tanpa harus memiliki keterampilan pemrograman, sehingga lebih mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Aplikasi berbasis Appsheet dan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dapat dipakai secara bersamaan karena keduanya memiliki kegunaan masing-masing. Aplikasi Appsheet memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara real-time dan memudahkan pengguna dalam melacak perpindahan berkas, sedangkan menurut Andriawan (2019) sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) digunakan untuk memudahkan pemutakhiran data dan validasi data-data pertanahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendaftaran tanah secara sporadik melalui sistem PTSLS, serta memperkuat peran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Aplikasi berbasis AppSheet digunakan secara beriring-iring dengan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk meminimalkan kekurangan yang ada pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Aplikasi ini berperan sebagai aplikasi pendamping dari sistem KKP dengan memudahkan pengumpulan dan pemrosesan data, mengidentifikasi pemegang file, memberikan akses dan otorisasi pengguna (Asisten Surveyor Kadaster (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)), serta mempermudah pelacakan file.

AppSheet merupakan sebuah platform pembuatan aplikasi tanpa kode yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi kustom tanpa keterampilan pemrograman yang mendalam (Purnomo, 2022). Dalam konteks pelayanan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, *AppSheet* dapat sekiranya membantu memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi pemegang berkas, memberikan akses dan kewenangan pengguna, dan memudahkan pencatatan perjalanan berkas.

AppSheet memiliki beberapa sistem keamanan yang terdapat pada aplikasi berbasis AppSheet menurut Exinity (2021) dan Pratomo (2007), antara lain:

1. Autentikasi pengguna: *AppSheet* memerlukan autentikasi pengguna untuk mengakses aplikasi. Autentikasi ini dapat dilakukan melalui *Email*, *Google*, atau akun *Microsoft*.
2. Otorisasi akses: *AppSheet* memungkinkan pengguna untuk mengatur otorisasi akses ke aplikasi. Pengguna dapat menentukan siapa saja yang dapat mengakses aplikasi dan apa saja yang dapat mereka lakukan di dalamnya.
3. Enkripsi data: *AppSheet* menggunakan enkripsi data untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Data pengguna dienkripsi saat disimpan di server *AppSheet* dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi akses.
4. Konektor data: *AppSheet* menyediakan konektor data untuk menghubungkan aplikasi dengan sumber data seperti *Google Spreadsheet*, *Excel*, *Cloud SQL*, *Salesforce*, dan konektor serupa lainnya. Aktivitas pengguna aplikasi disinkronkan ke sumber data yang terhubung.
5. Lisensi: *AppSheet* memiliki beberapa jenis lisensi yang dapat dibeli oleh pengguna. Pengguna *Enterprise Plus* dapat membuat dan memublikasikan aplikasi *AppSheet Core* ke pengguna *Enterprise Plus* lainnya di organisasi yang sama tanpa biaya tambahan.
6. *Login* dan undangan anggota tim: Pengguna dapat login ke *appsheet.com* dan mengundang anggota tim untuk menggunakan *AppSheet*. Pengguna juga dapat membuka *My Team Members Invite Members* untuk mengundang anggota tim.

Dengan sistem keamanan tersebut, pengguna (Asisten Surveyor Kadaster (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)) dapat merasa aman saat menggunakan aplikasi berbasis *AppSheet* karena data mereka terlindungi dari akses yang tidak sah.

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan mengalami kendala dalam memberikan pelayanan berkas pendaftaran tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Kendala tersebut antara lain Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak bisa melacak berkas pendaftaran tersebut ketika berhenti dan tidak dapat mengetahui pemegang berkas tersebut, sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) hanya bisa mengetahui atau mendeteksi perpindahan berkas tanpa dibarengi dengan siapa yang bertanggung jawab atas perpindahan berkas tersebut, dan akses sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) hanya terbatas orang yang memiliki akun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan permasalahan yang ada, dari rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran Tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)?
2. Bagaimana solusi atas kendala penelusuran atau pemberian informasi berkas, khususnya pada Pendaftaran Tanah Sporadik, melalui sistem informasi berbasis *Appsheets*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
2. Solusi atas kendala penelusuran atau pemberian informasi berkas pada Pendaftaran Tanah Sporadik dapat dilakukan melalui sistem informasi berbasis *AppSheet*. Sistem ini dapat memudahkan pengumpulan dan

pemrosesan data, mengidentifikasi pemegang file, memberikan akses dan otorisasi pengguna, serta mempermudah pelacakan file. Sistem informasi ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah secara sistematis dan meminimalkan kekurangan yang ada dalam pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian, serta dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
2. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.
3. Dapat memberikan solusi dalam mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, beberapa kendala dalam layanan pendaftaran tanah sporadik menjadi perhatian. Kurangnya efisiensi dalam penanganan dokumen berpotensi menimbulkan risiko kehilangan atau penanganan yang tidak tepat. Pencatatan perjalanan dokumen yang tidak lengkap membuat sulit untuk melacak posisi dokumen secara efektif. Keterbatasan akses akun juga dapat mengakibatkan identifikasi pemegang dokumen menjadi tidak jelas, menghambat akses ke dokumen yang diperlukan, dan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, kesulitan dalam pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat juga menyulitkan proses pembuatan keputusan dan pemantauan kinerja staf. Proses pengiriman dokumen yang tidak efisien dapat meningkatkan risiko kehilangan dokumen fisik, mengganggu proses pengukuran dan pemetaan tanah. Ketidakjelasan dalam identifikasi pemegang dokumen dapat menyebabkan kebingungan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam proses pendaftaran. Pencatatan perjalanan dokumen yang tidak lengkap dan terintegrasi juga dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran tanah. Selain itu, lambatnya proses disposisi dokumen juga berpotensi memperlambat proses pendaftaran dan meningkatkan risiko kehilangan atau penundaan dokumen.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diusulkan inovasi aplikasi pengelolaan berkas dalam layanan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Kabupaten Pasuruan. Dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi berbasis *AppSheet*, solusi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam manajemen berkas, serta memfasilitasi pemantauan kinerja staf. Solusi ini menekankan pentingnya identifikasi pemegang dokumen yang jelas, catatan perjalanan dokumen yang terintegrasi, dan pemrosesan data terpusat untuk mengurangi risiko hilangnya dokumen dan meningkatkan integritas seluruh proses pendaftaran tanah. Namun, perlu dilakukan uji pengguna yang efektif sebelum diluncurkan secara resmi guna memastikan kemudahan penggunaan dan kinerja yang optimal. Dengan demikian,

diharapkan inovasi ini mampu signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Kabupaten Pasuruan.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menghadapi beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan berkas Pendaftaran Tanah secara sporadik dengan menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat dilakukan, seperti implementasi program Larasita dalam Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Simtanas), penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap, peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi berbasis Appsheets, peningkatan transparansi dalam proses pelayanan pertanahan, dan peningkatan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem administrasi pertanahan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi, G. (2021). Proses Persiapan Data Sebelum Melakukan Analisis Data. Universitas Brawijaya. Jawa Timur
- Benu, V. W. (2020). Membaca Hak Publik di Kantor Pertanahan. Ombudsman Republik Indonesia.
- Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, D. A. M. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi. *Tunas Agraria*, 2(3).
- Diskominfo Garut. (2023). Menteri ATR BPN Serahkan Sertifikat Tanah Aset dan Komunal di Kabupaten Garut. Portal Jabarprovgo.id. Jawa Barat.
- Hastomo, F., & Yuhana, L. (2013). Perancangan dan Pembuatan Perangkat Lunak Aplikasi *Android* untuk Pengolahan Data Transaksi pada Perusahaan Telekomunikasi " X ". *Teknik Pomits*, 2(1).
- Ilmiyana, R. (2021). Cara Membuat Kuesioner dalam Penelitian. *IPB Training*. Jawa Barat
- Irawan, D. S., & Wulansari, H. (2020). Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas *Contradictoire Delimitatie* di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. *Tunas Agraria*, 3(2).
- Kusmitasari, I. (2017). Aplikasi Hafalan Al-Quran Menggunakan Metode Muraja'ah Berbasis *Android* (Studi Kasus Pondok Pesantren An-Nuriyyah Malang). 44–66.
- Mekel, O. L. dan D. (2019). Implementasi *Augmented Reality* dengan memanfaatkan *Location Based Service* pada Aplikasi Pengenalan Gedung Universitas Klabat Berbasis Android. *E-Jurnal JUSITI (Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi)*, 8–1.
- Nafisah, R., Isnaeni, D., & Taufik, M. (2022). Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 TAHUN 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. *Jurnal Dinamika*, 28(3), 3497–3518.
- Normalita, F. (2018). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya. Jawa Timur.
- Nur Azis, Gali Pribadi, & Manda Savitrie Nurcahya. (2020). Analisa dan Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Dasar Berbasis *Android*. *IKRA-ITH Informatika*, 4(3).

- Pengadilan Agama Pasuruan. (2023). PA Pasuruan Jalin Kerjasama Dengan BPN Kabupaten Pasuruan. SIPPN. Jawa Timur.
- Pradipta, W., & Rani, U. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai *Good Governance* Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(2), 173–181.
- Purnomo, E. (2022). Implementasi Qrcode Pada Presensi Kehadiran Menggunakan Platform Appsheet di TK Kusuma. *COREAI: Jurnal Kecerdasan Buatan, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 3(1), 54–61.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1).
- Rauf, A., & Prastowo, A. T. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Web Sistem Informasi Repository Laporan PKL Siswa (Studi Kasus SMK N 1 Terbanggi Besar). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(3).
- Sari, M. E. P. (2017). Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik di Kota Batam. *Jurnal Dimensi*, 6(2).
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (*Digital Local Government*). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M. K. (2013). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagai Penyelenggara Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Aplikasi Berbasis Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.
- Pemerintah Kab. Pasuruan/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional